

REPRESENTASI AKSI KAMISAN DALAM FRAMING MEDIA DAN RESISTENSINYA TERHADAP PENGABURAN SEJARAH MELALUI TEORI KOMUNIKASI MASSA

Muhammad Izra^{*}, Alfiyoka Wahyu Dwi Septiana², Az Zahroh Arroyaniah³, Muhammad Septiandio⁴, Rahma Aulia Iskandar⁵, Amalia Azmi Sitorus S.Pd., M.I.Kom⁶

^{1,2} Ilmu Komunikasi, Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang

^{*}E-mail: muhammadizra52@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Aksi Kamisan digambarkan dalam media massa dan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terhadap pengabaian sejarah di Indonesia. Aksi Kamisan merupakan lambang perlawanan melawan impunitas terkait pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan secara berkesinambungan sejak tahun 2007. Namun, seiring berjalannya waktu, makna dari aksi ini mulai kabur dalam pemberitaan media, yang lebih mengutamakan unsur kebaruan dan sensasi ketimbang inti dari perjuangannya. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori komunikasi massa seperti *Agenda Setting*, *Framing*, dan *Spiral of Silence*, penelitian ini menyajikan hasil wawancara mendalam dengan dua informan: Adhvidya (seorang akademisi dan mantan jurnalis) dan Septian (seorang aktivis Aksi Kamisan Sukabumi dari Gerakan Milenial Indonesia). Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa media utama tidak lagi menganggap Aksi Kamisan sebagai elemen penting dalam agenda publik. *Framing* yang diterapkan bersifat dangkal dan menghapus muatan politik, serta memperlemah ruang untuk mengkritik pemerintah. Sementara itu, media alternatif dan komunitas sipil berfungsi sebagai kekuatan naratif yang melawan, memperkuat ingatan kolektif, dan melawan disinformasi serta penulisan ulang sejarah yang dilakukan secara terencana. Aksi Kamisan tidak hanya bertindak sebagai demonstrasi simbolik yang diam, tetapi juga berperan sebagai arena pembelajaran untuk menyampaikan narasi sejarah alternatif dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu HAM. Penelitian ini menekankan bahwa dalam konteks dominasi politik dan ekonomi di ruang media, peran masyarakat sipil serta media independen sangatlah penting untuk menjaga kebenaran sejarah dan memperjuangkan keadilan sosial.

Keywords : Aksi Kamisan, Framing, Hak Asasi Manusia, Media, Pengabaian Sejarah.

ABSTRACT

This study aims to explore how Aksi Kamisan is portrayed in the mass media and the forms of community resistance to historical neglect in Indonesia. Aksi Kamisan is a symbol of resistance against impunity related to human rights violations that has been carried out continuously since 2007. However, over time, the meaning of this action began to blur in the media coverage, which prioritized the elements of novelty and sensation rather than the core of the struggle. By applying a qualitative approach and using mass communication theories such as Agenda Setting, Framing, and Spiral of Silence, this research presents the results of in-depth interviews with two informants: Adhvidya (an academic and former journalist) and Septian (an activist of Aksi Kamisan Sukabumi from the Indonesian Millennial Movement). The findings of the research show that the mainstream media no longer consider Aksi Kamisan as an important element in the public agenda. The framing applied is superficial and removes political content, and weakens the space to criticize the government. Meanwhile, alternative media and civil society function as a counter narrative force, strengthening collective memory, and resisting disinformation and the planned rewriting of history.

Aksi Kamisan does not only act as a silent symbolic demonstration, but also acts as a learning arena to convey alternative historical narratives.

Keywords : Aksi Kamisan, Framing, Historical Ignorance, Human Rights, Media.

PENDAHULUAN



Gambar 1. Aksi Kamisan

Aksi Kamisan merupakan salah satu bentuk perjuangan sipil yang terus-menerus dan bermakna dalam upaya menuntut keadilan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Aksi ini konsisten dilakukan setiap hari kamis di depan Istana Merdeka sejak pertama kali digelar pada tahun 2007, menampilkan demonstrasi yang damai dengan payung hitam sebagai ikon utama. Gerakan ini lahir dari inisiatif keluarga korban yang terdampak langsung, seperti Maria Catarina Sumarsih (Regar & Andryanto, 2024), Suciwati, dan Bedjo Untung. Aksi Kamisan tidak sekadar menjadi tuntutan terhadap pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat kolektif terhadap pentingnya keadilan dalam perjalanan demokrasi Indonesia (Wirawan, 2014).

Seiring waktu, Aksi Kamisan berkembang menjadi gerakan yang merespons perubahan sosial-politik, terutama pada masa kini ketika wacana penulisan ulang sejarah oleh pemerintah menjadi sorotan. Kebijakan yang berpotensi menghapus catatan-catatan pelanggaran HAM masa lalu ini menimbulkan kecemasan akan tergerusnya ingatan kolektif bangsa. Sebagai respon, Aksi Kamisan memperluas fokus perjuangannya, tidak hanya pada isu hukum dan keadilan, tetapi juga pada pertarungan narasi sejarah yang sedang berlangsung.

Meski demikian, representasi Aksi Kamisan dalam media arus utama sering kali tidak konsisten dan bahkan bermasalah. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik, tetapi dalam kasus Aksi Kamisan, media cenderung memberikan eksposur yang terbatas dan membingkai aksi tersebut dengan cara yang dapat mengurangi maknanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan

mengenai bagaimana media memilih dan menyampaikan informasi tentang gerakan ini, dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi pemahaman masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mencoba menggali bagaimana media arus utama merepresentasikan Aksi Kamisan, serta bagaimana masyarakat, khususnya aktivis dan pendukung, melakukan resistensi terhadap narasi yang berusaha mengaburkan sejarah. Teori-teori komunikasi massa seperti Agenda Setting, Framing, dan *Spiral of Silence* menjadi landasan untuk memahami bagaimana media mengatur agenda, membingkai isu, dan mempengaruhi opini publik dalam konteks sosial-politik yang sensitif.

Dengan mengkaji dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara media, gerakan sosial, dan politik memori di Indonesia. Studi ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat sipil mempertahankan ruang publik untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam menghadapi tekanan politik dan media.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teori komunikasi massa untuk mengkaji representasi media arus utama terhadap Aksi Kamisan (Cresswell, 2014). Dengan mengacu pada teori komunikasi massa, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Adhvidya, seorang akademisi dan mantan jurnalis, serta Septian, aktivis Aksi Kamisan di Sukabumi. Wawancara ini mengungkap tantangan dalam mempertahankan narasi keadilan dan hak asasi manusia di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika kompleks antara representasi media arus utama terhadap Aksi Kamisan dan upaya masyarakat sipil dalam mempertahankan memori kolektif melawan pengabaian sejarah. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif serta teori komunikasi massa, temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai moral dalam perjuangan Aksi Kamisan dan cara media komersial yang lebih fokus pada aspek berita. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan Adhvidya, seorang akademisi dan mantan jurnalis, serta Septian, seorang aktivis Aksi Kamisan di Sukabumi dan anggota Gerakan Milenial Indonesia (GMI), mengungkapkan berbagai tantangan sistemik yang dihadapi dalam menjaga narasi mengenai keadilan dan hak asasi manusia di ruang publik di Indonesia.

Transformasi Nilai Berita dan Marginalisasi Aksi Kamisan



Gambar 2. Wawancara Septian, seorang aktivis Aksi Kamisan asal Sukabumi.

Analisis mengenai cara media arus utama menggambarkan Aksi Kamisan menunjukkan bahwa aksi tersebut mengalami marginalisasi secara sistematis dalam agenda pemberitaan nasional. Menurut Adhvidya, aksi yang dimulai pada tahun 2007 ini kehilangan ketertarikan media karena tidak sesuai dengan kriteria nilai pemberitaan yang dicari oleh industri media saat ini (Ningsih, 2024). Aksi Kamisan, yang awalnya terinspirasi oleh model gerakan Madres de Plaza de Mayo di Argentina, kini dianggap tidak lagi menawarkan unsur kebaruan yang menjadi syarat utama untuk diliput.

"Aksi Kamisan itu sudah ada sejak lama. Saya ingat pertama kali diadakan pada Januari 2007, jika tidak salah. Dan itu juga mencontohkan budaya dari Argentina ,"

Ujar Adhvidya dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini mendukung data sejarah yang menunjukkan bahwa Aksi Kamisan pertama kali dilakukan pada 15 Januari 2007, terinspirasi oleh gerakan Madres de Plaza de Mayo di Argentina (Wikipedia contributors, 2025). Namun, ada perbedaan penting dalam konteks politik dan reaksi media antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin tersebut.

Fenomena ini mencerminkan pola pikir dalam industri media yang lebih mementingkan sensasi daripada substansi permasalahan. Aksi yang dilakukan dengan damai dan rutin setiap hari Kamis justru dianggap sebagai kelemahan dari sudut pandang nilai pemberitaan.

"Dari sisi nilai berita, itu sudah kehilangan maknanya. Menurut pandangan media, nilai berita harus mengandung unsur kebaruan," tegasnya.

Sementara itu, Septian mengakui bahwa media nasional tidak lagi memperhatikan Aksi Kamisan. Ia mengatakan,

"Media nasional, terutama yang besar, tidak mau lagi mengangkat suara. Hanya media independen atau NGO (Non-Governmental Organization) yang masih terus berupaya."

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara urgensi moral isu hak asasi manusia dengan mekanisme pasar media yang lebih mengutamakan keuntungan dan pragmatisme (Sen K., 2014).

Framing Reduktif dan Depolitisasi Narasi Perjuangan

Framing (pembingkai), yang dilakukan oleh media arus utama terhadap Aksi Kamisan menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi makna dan menghilangkan aspek politik dari narasi perjuangan. Analisis yang dilakukan oleh Adhvidya mengindikasikan bahwa media sering menggambarkan aksi ini sebagai kegiatan biasa yang tidak berpengaruh langsung pada perubahan sosial-politik.

"Framing yang disampaikan seolah-olah tidak ada yang baru. Mereka terus bersuara, bersuara, dan bersuara. Tidak ada framing yang berbeda," jelasnya.

Pendekatan *framing* yang dangkal ini mencerminkan ketidakmampuan atau ketidaksediaan media untuk menyelami tatanan struktural yang terkait dengan masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Septian, yang menyatakan bahwa,

"Media nasional sangat menyederhanakan dan kurang memperhatikan Aksi Kamisan. "

Pengurangan makna ini juga terlihat dari kurangnya pembahasan mendalam mengenai tuntutan spesifik yang diajukan oleh para aktivis Aksi Kamisan, seperti pembentukan pengadilan hak asasi manusia, pemberian ganti rugi kepada korban, dan pengungkapan kebenaran terkait kasus penghilangan paksa. Media lebih memilih untuk menampilkan narasi yang tidak menimbulkan kontroversi politik, yaitu dengan menggambarkan para aktivis sebagai orang-orang yang "hanya" meratapi nasib tanpa mengaitkannya dengan tuntutan untuk perubahan sistem yang lebih mendasar (Entman, 1993).

Dinamika Agenda Setting dan Marginalisasi Isu HAM

Teori *Agenda Setting* menggambarkan bagaimana media dapat mempengaruhi isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat (McCombs & Shaw, 1972). Dalam konteks Aksi Kamisan, terlihat bahwa media arus utama tidak menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam laporan pemberitaan. Adhvidya

menunjukkan bahwa pemberitaan tentang Aksi Kamisan hanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, seperti saat ada kunjungan presiden atau menjelang pemilu.

"Mereka bahkan dari 18 tahun itu hanya dikunjungi dua kali oleh Presiden. Presiden SBY sekali, dan Presiden Jokowi selama dua periode hanya sekali," tuturnya.

Hal ini mencerminkan rendahnya perhatian lembaga negara terhadap tuntutan keadilan yang disampaikan melalui Aksi Kamisan. Kurangnya dukungan politik tingkat tinggi ini berimbas pada rendahnya perhatian media untuk secara teratur meliput aksi tersebut.

Hal ini menciptakan situasi di mana isu HAM semakin terabaikan dari perhatian publik. Ketika media tidak memberikan cukup ruang untuk isu keadilan, masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai untuk membangun opini yang terinformasi mengenai pentingnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Akibatnya, kondisi ini memperkuat keadaan yang ada dan mempertahankan impunitas yang selama ini menjadi sorotan kritik Aksi Kamisan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023).

Spiral of Silence dan Dominasi Narasi Utama

Teori *Spiral of Silence* yang diperkenalkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann sangat penting untuk memahami perkembangan berita seputar Aksi Kamisan. Konsep ini menggambarkan bagaimana orang cenderung menahan opini mereka ketika merasa dianggap minoritas, sehingga suara mayoritas semakin mendominasi percakapan publik. Dalam konteks Aksi Kamisan, kurangnya laporan dan cara pandang yang sempit menciptakan anggapan bahwa isu hak asasi manusia tidak menjadi perhatian publik.

Adhvidya mencatat bahwa ketika media hanya memperlihatkan pandangan mayoritas yang tidak peduli atau menolak isu hak asasi manusia, suara-suara dari aktivis dan para korban menjadi semakin lemah dan terasing.

"Jika nilai berita tidak ada, lalu kenapa berita itu dipublikasikan. Karena akan terlihat tidak menarik bagi kita," ujarnya.

Pernyataan ini menyoroti bagaimana logika komersial media berkontribusi pada pembungkaman suara-suara yang sebenarnya memperjuangkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar.

Sementara itu, Septian menambahkan bahwa tantangan semakin besar karena generasi muda hari ini cenderung apatis terhadap perjuangan hak asasi manusia.

"Anak muda tidak semuanya mau berkecimpung ... Ini tugas kita bersama sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual," tegasnya.

Konsekuensi dari teori *Spiral Of Silence* ini sangat besar bagi kelangsungan gerakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ketika suara-suara yang memperjuangkan keadilan semakin dikesampingkan dari forum publik, masyarakat kehilangan peluang untuk menumbuhkan rasa empati dan solidaritas terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini pada akhirnya menguntungkan pihak-pihak yang ingin menjaga keadaan tetap sama dan menghindari tanggung jawab atas kesalahan masa lalu (Noelle-Neumann, 1974).

Resistensi Media Alternatif dan Gerakan Masyarakat Sipil

Meskipun media konvensional menunjukkan kurangnya minat terhadap Aksi Kamisan, penelitian ini mengungkapkan ada ruang-ruang alternatif yang terus memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia. Media alternatif, lembaga masyarakat sipil, dan platform digital mandiri memiliki peran penting dalam mempertahankan narasi keadilan. Media-media ini tidak terikat pada logika pasar seperti media konvensional, sehingga mereka lebih leluasa dalam menyelami isu-isu sensitif dan memberikan peluang bagi suara-suara yang terpinggirkan.

Septian mengakui bahwa hanya media independen yang konsisten menyuarakan Aksi Kamisan dan mendukung secara mendalam.



Gambar 3. Kegiatan refleksi diri pada Aksi Kamisan oleh masyarakat sipil.

"Kalau untuk media yang dikelola individu atau NGO (Non-Governmental Organization) sangat efektif karena mereka sangat detail dan mensupport," ungkapnya.

Adanya media alternatif ini membentuk narasi tandingan terhadap dominasi media konvensional yang cenderung melupakan isu hak asasi manusia. Melalui platform-platform ini, para aktivis Aksi Kamisan dapat menyampaikan pesan mereka dengan cara yang lebih menyeluruh dan kontekstual, tanpa mengalami penyederhanaan makna yang sering terjadi di media konvensional. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberagaman sumber informasi dalam masyarakat

yang demokratis, di mana berbagai sudut pandang dapat bersaing dalam ruang publik.

Resistensi ini juga nampak dari ketahanan gerakan Aksi Kamisan yang telah bertahan lebih dari 17 tahun meskipun menghadapi berbagai kesulitan, termasuk pengabaian dari media. Ketekunan ini mencerminkan komitmen mendalam dari para aktivis dan keluarga para korban dalam memperjuangkan keadilan, yang tidak bisa dihentikan hanya karena kurangnya perhatian dari media konvensional (Proust, 2023).

Implikasi Penulisan Ulang Sejarah terhadap Memori Kolektif

Diskursus tentang penulisan ulang sejarah Indonesia yang berkembang akhir-akhir ini menambah kerumitan tantangan yang dihadapi oleh gerakan hak asasi manusia. Adhvidya menyatakan kekhawatirannya mengenai konsekuensi jangka panjang dari usaha mengubah sejarah terhadap ingatan kolektif bangsa.

"Menurut pandangan saya, terdapat sebuah prinsip yang tetap berlaku. Pepatah mengatakan, pemenang yang menentukan histori(sejarah) mereka," ujarnya.

Pandangan ini menggambarkan pemahaman mengenai politik dalam sejarah, di mana narasi yang dominan sering kali ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, usaha penulisan ulang sejarah berpotensi menghapus jejak-jejak penting mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, termasuk kasus-kasus yang menjadi perhatian Aksi Kamisan.

Septian pun menekankan pentingnya kesadaran sejarah di kalangan generasi muda. Ia mengajak anak-anak muda untuk membaca kembali narasi dan pemikiran tokoh-tokoh bangsa seperti Tan Malaka, Soekarno, dan Sutan Syahrir.

"Jangan melupakan sejarah. Ketika membaca kembali pemikiran mereka, kita akan menemukan mengapa bangsa ini didirikan dan apa yang diperjuangkan," katanya.

Konsekuensi dari penulisan ulang sejarah tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam aspek politik dan sosial. Ketika sejarah diubah atau disesuaikan dengan kepentingan politik tertentu, generasi mendatang kehilangan akses terhadap kebenaran sejarah yang bisa menjadi pelajaran penting guna mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Dalam hal ini, Aksi Kamisan tidak sekadar berfungsi sebagai salah satu bentuk protes, melainkan juga sebagai penjaga ingatan yang berusaha memastikan bahwa kejahatan masa lalu tidak dilupakan.

Peran Media di Era Disinformasi dan Tekanan Politik

Kehadiran era digital dan meluasnya media sosial menghasilkan dinamika baru dalam pembentukan pandangan publik terkait isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia. Adhvidya mencatat bahwa di lingkungan media sosial, pandangan publik lebih mudah dikenali melalui bagian komentar dan interaksi digital lainnya.

"Sekarang itu opini publik itu enak ya bagaimana kita melihat suatu hal, seperti dalam sebuah peristiwa pemberitaan itu, opini publik yang paling dasar bisa dilihat dari komentarnya," ungkapnya.

Namun, kemudahan ini juga membuka ruang bagi penyebaran disinformasi. Septian mengingatkan bahwa sejarah yang tidak dibaca secara kritis bisa digantikan oleh narasi palsu. Dalam konteks ini, pendidikan politik dan literasi media menjadi penting untuk membentengi generasi muda dari manipulasi sejarah dan propaganda yang menguntungkan pihak berkuasa.

Tantangan ini semakin rumit ketika media harus menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk menyembunyikan atau mengubah sejarah kelam negara. Dalam keadaan seperti ini, kemandirian editorial menjadi elemen penting yang menentukan apakah media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pendidik bagi masyarakat. Ketidaktahuan media dalam melaksanakan peran ini dapat berakibat melemahnya demokrasi dan memperkuat budaya impunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya disparitas yang mencolok antara nilai-nilai moral perjuangan Aksi Kamisan dan cara media arus utama yang lebih mengutamakan logika komersial. Sudah sejak tahun 2007, Aksi Kamisan diadakan secara konsisten sebagai bentuk penolakan terhadap impunitas pelanggaran hak asasi manusia, namun justru terpinggirkan dalam pemberitaan media nasional. Hasil wawancara dengan Adhvidya dan Septian mengungkap bahwa media arus utama cenderung menyederhanakan makna dari aksi ini, serta mengabaikan konteks politik serta tuntutan struktural yang diajukan oleh para aktivis.

Pola pemberitaan media arus utama tidak hanya menyamarkan aspek perjuangan Aksi Kamisan, tetapi juga memperkuat kondisi yang disebut spiral of silence, di mana suara para korban dan pejuang HAM terabaikan oleh dominasi narasi mayoritas. Media tidak menjalankan peran agenda setting dengan adil dalam isu-isu HAM, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap informasi penting yang seharusnya menjadi bahan untuk refleksi bersama.

Di sisi lain, media alternatif, organisasi non-pemerintah, dan elemen masyarakat sipil memiliki peranan kunci dalam mempertahankan narasi yang benar. Melalui platform digital dan komunitas independen, suara-suara perlawanan tetap disampaikan, meskipun media besar tidak lagi memberikan ruang. Tokoh seperti pelaku langsung Aksi Kamisan di Sukabumi menunjukkan bahwa gerakan dari akar rumput terus setia menjaga memori kolektif bangsa, terutama dalam menghadapi upaya negara untuk mengubah sejarah.

Dengan demikian, Aksi Kamisan tidak hanya penting sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga sebagai alat perlawanan terhadap rekayasa sejarah dan pengabaian yang sistematis. Untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan keadilan di Indonesia, sangat penting bagi media untuk kembali menjalankan fungsi etisnya sebagai penjaga kebenaran, serta bagi generasi muda untuk terus mempertahankan ingatan kolektif melalui pendidikan kritis dan partisipasi sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada Ibu Maria Catarina Sumarsih, sebagai sosok kunci dalam Aksi Kamisan, yang telah memberikan dorongan bagi usaha menuju keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kami juga mengucapkan penghargaan kepada Ibu Amalia Azmi Sitorus, S.Pd., M.I.Kom., atas panduan, arahan, dan dukungan akademik yang sangat berharga dalam penyusunan jurnal ini.

Ucapan terima kasih yang tulus kami tujukan kepada narasumber penelitian, Bapak Adhvidya, S.I.Kom., M.Si., yang juga merupakan pengajar kami dalam mata kuliah Regulasi dan Kebijakan Media, serta Saudara Septian, aktivis Aksi Kamisan Sukabumi dari Gerakan Millenial Indonesia, yang telah menyempatkan diri dan memberikan wawasan berharga tentang representasi media dan dinamika perjuangan masyarakat sipil terhadap pelanggaran HAM.

Kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua dosen pengampu, sahabat-sahabat sejawat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, serta semangat — baik secara langsung maupun tidak langsung — sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fajri, D. S. (2025, June 8). Pemerintah tulis ulang sejarah Indonesia. GoodStats. <https://goodstats.id/article/pemerintah-buat-penulisan-sejarah-indonesia-baru-w5Ypn>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. https://www.researchgate.net/publication/332246566_Book_Review_Creswell_J_W_2014_Research_Design_Qualitative_Quantitative_and_Mixed_Methods_Approaches_4th_ed_Thousand_Oaks_CA_Sage
- Dinamika, R. (2025, January 24). Perjalanan 18 Tahun Aksi Kamisan: Mereka yang Tak Pernah Berhenti Berharap - Klikdinamika.com. Retrieved June 9, 2025, from <https://klikdinamika.com/perjalanan-18-tahun-aksi-kamisan-mereka-yang-tak-never-berhenti-berharap.html>
- Entman, R. M. (1993). Framing: toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>

Framing pemberitaan kasus Munir pada edisi khusus 10 tahun Munir di situs web tempo.co. (2017). In JURNAL E-KOMUNIKASI: Vol. VOL 5 (Issue NO.1) [Journal-article].

Hill, D. T., & Sen, K. (2000). Media, culture and politics in Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/David-Hill-92/publication/353314048_Media_culture_and_politics_in_Indonesia/links/60f2da81fb568a7098b7e313/Media-culture-and-politics-in-Indonesia.pdf

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023, March 31). Peserta Diklat Lemhannas Peroleh Pencerahan tentang Hak Memperoleh Keadilan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/03/31/2228/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2023.html>

Kontributor proyek Wikimedia. (2025, April 14). Aksi Kamisan. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Retrieved June 9, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Kamisan

Martiar, N. a. D. (2024, January 19). Aksi Kamisan, 17 tahun perjuangan menuntut keadilan. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/19/aksi-kamisan-17-tahun-perjuangan-menuntut-keadilan>

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (2017). The agenda-setting function of mass media¹ 2. The Agenda Setting Journal, 1(2), 105–116. <https://doi.org/10.1075/asj.1.2.02mcc>

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176. <https://doi.org/10.1086/267990>

Ningsih, W. L. (2024, February 18). Sejarah Aksi Kamisan, Digelar Pertama Kali pada 2007. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/02/18/180000679/sejarah-aksi-kamisan-digelar-pertama-kali-pada-2007>

Noelle-Neumann, E., University of Mainz, Institut fur Demoskopie Allensbach, Ernst Forsthoff, Reinhard Horstel, & Arnold Gehlen. (1974). The Spiral of Silence: A Theory of Public opinion. In Journal of Communication. https://vnecas.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/03/spiral_of_silence.pdf

Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence a theory of public opinion. Journal of Communication, 24(2), 43–51. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x>

- Proust, V. (2023). By sharing our loss, we fight: Collective expressions of grief in the digital age. *Media Culture & Society*, 46(2), 393–403. <https://doi.org/10.1177/01634437231207760>
- Randy, F. (2021). Mereka yang Menuntut Keadilan. In *historia.id*. <http://scholar.unand.ac.id/121131/1/Bab%20I.pdf>
- Regar, R. F., & Andryanto, S. D. (2024, January 19). Profil Sumarsih Pencari Keadilan untuk Anaknya di Setiap Aksi Kamisan hingga 17 Tahun Ini. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/profil-sumarsih-pencari-keadilan-untuk-anaknya-di-setiap-aksi-kamisan-hingga-17-tahun-ini-96132>
- Sitoresmi, A. R. (2025, February 25). Tujuan Aksi Kamisan: Perjuangan Keadilan HAM di Indonesia. *liputan6.com*. Retrieved June 9, 2025, from <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903934/tujuan-aksi-kamisan-perjuangan-keadilan-ham-di-indonesia>
- Sitorus, A. A., et al. & Universitas Paramadina. (2021). DISINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19. In *Jurnal Renaissance* (Vol. 6, Issue 01, pp. 721–732) [Journal-article]. <https://media.neliti.com/media/publications/483583-none-6bebd7df.pdf>
- Wikipedia contributors. (2025, May 27). Mothers of Plaza de Mayo. *Wikipedia*. Retrieved June 10, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo
- Wirawan, Y. (2014). Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film by Wijaya Herlambang. *Social Transformations Journal of the Global South*, 2(2), 64. <https://doi.org/10.13185/1955>